**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

INSTANSI/SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :				
	1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses rekrutmen pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Belum terjaminnya kebenaran informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
	2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan hasil pengukuran kompetensi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999 • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan

	<p>3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang</p> <p>a. Laporan Keuangan yang belum diaudit</p> <p>b. Kode PIN Rekening Bank pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah • UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai audit selesai • Selama kode masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose • Menjaga keamanan rekening bank
	<p>4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai</p> <p>b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <p>c. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PP 10 Th. 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 • PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS • PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama 3 periode penilaian • Sampai diterbitkannya SK • Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

2	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY 	<ul style="list-style-type: none"> Hingga proses surat tersebut selesai 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat Kebjiakan Pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak objektif 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
4	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Muncul persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjaga objektivitas Penilaian
5	Kode akses elektronik aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> Selama kode masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Juni 2018

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
Setda DIY

Ir. Sugeng Purwanto, M.MA
NIP. 19650525 199103 1 017